

DOKUMEN

PERUBAHAN
RENCANA KERJA
(RENJA)

TAHUN ANGGARAN 2023



DINAS PERINDUSTRIAN DAN
KETENAGAKERJAAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM.....	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	5
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	5
BAB II EVALUASI RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II.....	6
2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Sampai Dengan Triwulan II.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	13
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah	15
2.4. Penentuan Isu-isu Strategis.....	17
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	19
3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan	19
3.1.1 Bidang Perindustrian :	19
3.1.2 Bidang ketenagakerjaan :	20
3.1.3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daeah	21
3.2. Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif.....	21
BAB IV PENUTUP.....	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana kerja merupakan dokumen perencanaan yang telah disesuaikan dan menjadi pedoman serta rujukan dalam menyusun program dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja Perangkat Daerah. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai RKPD dan Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahap awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen.. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah

pada tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Perubahan Rencana Kerja tahun 2023, yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Perangkat Daerah serta untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi .
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
14. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024-2026
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja adalah untuk merumuskan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan dalam periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah. Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan, penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

II. EVALUASI RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

- 2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Sampai Dengan Triwulan II
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah
- 2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Sampai Dengan Triwulan II

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan bermaksud untuk mengetahui sejauh mana capaian pelaksanaan Renja tahun 2023 sampai pada Triwulan II. Tujuan Evaluasi hasil Renja tahun 2023 yaitu untuk menilai dan memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan dalam Renja tahun 2023 sampai dengan triwulan II dan sasaran Renstra dapat dicapai dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023. Rekapitulasi pelaksanaan renja Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan sampai dengan Triwulan II disajikan dalam tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1 Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021 s/d 2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja OPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Unit OPD penanggung jawab	Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023					
					6		7		8		9		10		11		12				13=9+10+11+12				14=7+13		15=14/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah			Nilai Sakit Perangkat Daerah	74,06 Angka	12.678.862.740	0 Angka	0	61,06 Angka	2.899.936.400																			
				Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	85 Angka		0 Angka		70 Angka																				
				Laporan Keuangan OPD sesuai standar akuntansi pemerintahan	sesuai Huruf		sesuai Huruf		sesuai Huruf																				
		3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja	72,31 %	12.678.862.740	0,00 %	0	70,28 %	2.899.936.400																			
				Persentase Capaian Kinerja Keuangan	95,00 %		0,00 %		85,00 %																				
		3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95,00%	305.000.000	0,00	0	80,00%	20.000.000	66,67%	0	0,00%	8.000.000	0,00%	0	0,00%	0	66,67%	8.000.000	14,17%	8.000.000	17,71%	2,62%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJIAN				
		3.31.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10	85.000.000	0	0	2	3.000.000	2	0	0	3.000.000	0	0	0	0	2	0	2	0	0	20,00%	0,00%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJIAN	Tercapai		
		3.31.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5	42.000.000	0	0	1	4.000.000	1	0	0	4.000.000	0	0	0	0	1	4.000.000	1	4.000.000	20,00%	9,52%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJIAN	Tercapai			
		3.31.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5	42.000.000	0	0	1	4.000.000	1	0	0	2.900.000	0	0	0	0	1	2.900.000	1	2.900.000	20,00%	6,90%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJIAN	Tercapai			
		3.31.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4	42.000.000	0	0	1	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,00%	0,00%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJIAN	Belum Tercapai			
		3.31.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	42.000.000	0	0	3	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJIAN	Belum Tercapai			
		3.31.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	20	52.000.000	0	0	3	3.000.000	0	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000	0,00%	2,12%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJIAN	Belum Tercapai			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021 s/d 2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Unit OPD penanggung jawab	Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13-9+10+11+12		14-7+13		15-14/6x100			
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00%	7.771.088.882	0,00	0	100,00%	2.385.171.400	89,58%	220.720.463	89,58%	834.738.616	0,00%	0	0,00%	0	179,17%	1.055.459.079	5,27%	1.055.459.079	5,27%	13,58%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGA KERJAAN	
		3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.440	7.646.088.882	0	0	360	2.362.936.400	90	220.720.463	90	828.353.616	0	0	0	180	1.049.074.079	180	1.049.074.079	12,50%	13,72%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGA KERJAAN	Belum Tercapai	
		3.31.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5	40.000.000	0	0	1	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGA KERJAAN	Belum Tercapai
		3.31.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	5	40.000.000	0	0	1	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGA KERJAAN	Belum Tercapai
		3.31.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	70	45.000.000	0	0	12	8.235.000	3	0	3	6.385.000	0	0	0	6	6.385.000	6	6.385.000	8,57%	14,19%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGA KERJAAN	Belum Tercapai	
		3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100,00%	0	0,00	0	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGA KERJAAN	
		3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kelancaran Administrasi Operasional Perkantoran	100,00%	2.524.773.859	0,00	0	100,00%	308.018.400	33,33%	34.044.000	72,22%	176.359.015	0,00%	0	0,00%	0	105,56%	210.403.015	15,83%	210.403.015	15,83%	8,33%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGA KERJAAN	
		3.31.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	40	250.000.000	0	0	21	98.852.000	1	0	2	64.013.000	0	0	0	3	64.013.000	3	64.013.000	7,50%	25,61%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGA KERJAAN	Belum Tercapai	
		3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	250.000.000	0	0	12	9.666.400	0	1.250.000	1	3.876.400	0	0	0	1	5.126.400	1	5.126.400	20,00%	2,05%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGA KERJAAN	Belum Tercapai	
		3.31.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5	2.024.773.859	0	0	12	199.500.000	0	32.794.000	1	108.469.615	0	0	0	1	141.263.615	1	141.263.615	20,00%	6,98%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGA KERJAAN	Belum Tercapai	
		3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kelancaran Administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100,00%	0	0,00	0	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGA KERJAAN	
		3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	1.277.999.999	0,00	0	100,00%	164.526.600	150,00%	28.690.406	350,00%	69.763.153	0,00%	0	0,00%	0	500,00%	98.453.559	45,00%	98.453.559	45,00%	7,70%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGA KERJAAN	
		3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60	927.999.999	0	0	12	51.980.000	3	7.890.406	3	17.581.553	0	0	0	6	25.471.959	6	25.471.959	10,00%	2,74%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGA KERJAAN	Belum Tercapai	
		3.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5	350.000.000	0	0	8	112.546.600	0	20.800.000	4	52.181.600	0	0	0	4	72.981.600	4	72.981.600	80,00%	20,85%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGA KERJAAN	Belum Tercapai	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021 s/d 2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Unit OPD penanggung jawab	Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1		3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kelancaran Administrasi Barang Milik Daerah	100,00%	800.000.000	0,00	0	100,00%	22.220.000	0,00%	0	0,00%	10.186.000	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	10.186.000	0,00%	10.186.000	0,00%	1,27%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN			
		3.31.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	5	350.000.000	0	0	5	18.200.000	0	0	0	10.186.000	0	0	0	0	0	10.186.000	0	10.186.000	0,00%	2,91%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN	Belum Tercapai		
		3.31.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	29	450.000.000	0	0	12	4.020.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN	Belum Tercapai		
2	Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenagakerja			Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	8 %	2.672.153.032	2,75 %	0	3,75 %	1.588.600.000																		
				Tingkat Produktivitas tenaga kerja	65 %		54 %		56 %																			
		2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	2,50 %	650.000.000	0,00 %	0	1,17 %	133.400.000																		
		2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Kompetensi Unit	Persentase terlaksananya Pelatihan berdasarkan unit kompetensi	100,00%	500.000.000	0,00	0	100,00%	83.400.000	0,00%	1.400.000	66,67%	12.260.000	0,00%	0	0,00%	0	66,67%	13.660.000	8,33%	13.660.000	8,33%	2,73%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN			
		2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	240	500.000.000	0	0	30	83.400.000	0	1.400.000	20	12.260.000	0	0	0	20	13.660.000	20	13.660.000	8,33%	2,73%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN	Belum Tercapai			
		2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	persentase terlaksananya konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil	100,00%	150.000.000	0,00	0	100,00%	50.000.000	0,00%	7.080.000	50,00%	11.306.000	0,00%	0	0,00%	0	50,00%	18.386.000	6,25%	18.386.000	6,25%	12,26%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN			
		2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Produktivitas (Perusahaan)	80	150.000.000	0	0	10	50.000.000	0	7.080.000	5	11.306.000	0	0	0	5	18.386.000	5	18.386.000	6,25%	12,26%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN	Belum Tercapai			
		2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	50,00 %	853.000.000	0,00 %	0	25,00 %	183.400.000																		
		2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	persentase terlaksananya pelayanan antar kerja di daerah kab/kota	100,00%	75.000.000	0,00	0	100,00%	14.475.000	18,92%	0	51,35%	2.277.000	0,00%	0	0,00%	0	70,27%	2.277.000	14,29%	2.277.000	14,29%	3,04%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN			
		2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	910	75.000.000	0	0	185	14.475.000	35	0	95	2.277.000	0	0	0	130	2.277.000	130	2.277.000	14,29%	3,04%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN	Belum Tercapai			
		2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah kabupaten/kota yang dilindungi	100,00%	128.000.000	0,00	0	100,00%	35.525.000	0,00%	0	0,00%	1.460.000	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1.460.000	0,00%	1.460.000	0,00%	1,14%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN			
		2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	102	128.000.000	0	0	25	35.525.000	0	0	0	1.460.000	0	0	0	0	1.460.000	0	1.460.000	0,00%	1,14%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN	Belum Tercapai			
		2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan tata kelola perusahaan yang layak	1,80 %	1.169.153.032	0,00 %	0	0,90 %	1.271.800.000																		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021 s/d 2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (akhir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Unit OPD penanggung jawab	Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023				
									I	II	III	IV	13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100									
1	2	3	4	5	6		7		8		9				10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100	
		2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pengesahan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama	100,00%	166.153.032	0,00	0	100,00%	1.058.000.000	0,00%	0	33,33%	339.699.000	0,00%	0	0,00%	0	33,33%	339.699.000	4,97%	339.699.000	4,97%	204,45%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN	
		2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	44.664	166.153.032	0	0	6.666	1.058.000.000	0	0	2.222	339.699.000	0	0	0	0	2.222	339.699.000	2.222	339.699.000	4,97%	204,45%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN	Belum Tercapai
		2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang terlaksana	100,00%	150.000.000	0,00	0	100,00%	30.400.000	0,00%	2.400.000	0,00%	7.970.000	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	10.370.000	0,00%	10.370.000	0,00%	6,91%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN	
		2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	0	150.000.000	0	0	0	30.400.000	0	2.400.000	0	7.970.000	0	0	0	0	0	10.370.000	0	10.370.000	0,00%	6,91%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN	Belum Tercapai
3	Meningkatkan pendapatan masyarakat pelaku usaha			Pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah	1500 Angka	6.092.403.175	1300 Angka	0	1350 Angka	600.200.000																
		3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang berkembang modal usaha dan tenaga kerja	22,00 %	6.092.403.175	0,00 %	0	15,00 %	600.200.000																
		3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri	100,00%	6.092.403.175	0,00	0	100,00%	600.200.000	25,00%	300.000.000	25,00%	14.887.200	0,00%	0	0,00%	0	50,00%	314.887.200	1,01%	314.887.200	1,01%	5,17%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN	
		3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	55	1.556.703.175	0	0	2	100.000.000	0	0	1	14.887.200	0	0	0	0	1	14.887.200	1	14.887.200	1,82%	0,96%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN	Belum Tercapai
		3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	500	4.535.700.000	0	0	2	500.200.000	1	300.000.000	0	0	0	0	0	0	1	300.000.000	1	300.000.000	0,20%	6,61%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN	Belum Tercapai
Total Target (RP)										4.771.936.400		Total Realisasi (RP)				2.083.240.853										
Rata-rata capaian kinerja (%)										43,81		Rata-rata capaian kinerja (%)				43,66										
Predikat kinerja										SR		Predikat kinerja				SR										

Berdasarkan tabel 2.1 rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja capaian kinerja keuangan masih 43,66%. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan setiap subkegiatan realisasi fisik sudah sampai kepada tahapan pelaksanaan sedangkan untuk capaian realisasi keuangannya ada subkegiatan yang belum dilaksanakan, pencairan rincian subkegiatan dilakukan secara bertahap serta ada beberapa subkegiatan yang pagu anggarannya belum tercukupi dan akan dilakukan pergeseran dan penambahan anggaran pada renja perubahan sehingga belum dilaporkan sampai dengan triwulan kedua. Berikut penjabaran pencapaian subkegiatan sampai dengan triwulan II (juni 2023) yang telah memenuhi target karena telah dilaksanakan, yang tidak memenuhi target karena belum dilaksanakan, dan sub kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun berjalan :

1) Sub kegiatan yang telah memenuhi target/telah dilaksanakan.

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dari target 2 Dokumen telah terealisasi 2 Dokumen, yaitu Renja 2024 dan Renstra Perubahan 2021-2026. Dan Keuangan dari pagu Rp.3.000.000 telah teralisasi anggaran sebesar Rp.3.000.000
- b. Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA- SKPD, dari target 1 Dokumen telah terealisasi 1 Dokumen, yaitu Dokumen Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD tahun 2023, dan

keuangan dari pagu Rp.4000.000, telah teralisasi anggaran sebesar Rp.4.000.000

- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, dari target 1 Dokumen telah terealisasi 1 Dokumen, yaitu Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD. Dan Keuangan dari pagu Rp.4.000.000 telah teralisasi anggaran sebesar Rp.4.000.000

2) Sub kegiatan yang tidak memenuhi target karena belum dilaksanakan.

Untuk subkegiatan yang tidak memenuhi target kinerja keuangan hampir mencakup semua subkegiatan pada setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan. Untuk pelaksanaan kegiatan teknis maupun kegiatan rutin, pencairan subkegiatan dilakukan secara bertahap sesuai kondisi pelaksanaan kegiatan dan akan dilaksanakan pada triwulan ketiga dan keempat. Terdapat subkegiatan yang pelaksanaannya akan terkendala selama sisa bulan kegiatan dikarenakan anggaran yang tidak mencukupi yakni Subkegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (BBM dan Service Suku Cadang), untuk itu akan dilaksanakan pergeseran anggaran dan juga akan dilakukan permintaan penambahan anggaran.

Berikut penjabaran pencapaian subkegiatan sampai dengan triwulan II (juni 2023) :

3) Sub kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun berjalan

Untuk subkegiatan yang tidak dilaksanakan karena pagu anggaran belum mencukupi sampai dengan triwulan kedua adalah subkegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya (disediakan untuk BLK sebanyak 10 unit perbaikan mesin CPU namun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran hanya mengcover 3 unit pemeliharaan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Capaian Kinerja Pelayanan organisasi perangkat daerah akan menjelaskan pencapaian Indikator Kinerja Utama berdasarkan Renstra yang telah disusun.

Adapun Bidang Perindustrian pelaksanaan program dan kegiatannya mengacu kepada misi ke 4 pembangunan daerah yakni mengembangkan pengelolaan potensi kemaritiman. Adapun sasarannya untuk meningkatkan usaha pariwisata.

Untuk Bidang Ketenagakerjaan Pelaksanaan Program dan Kegiatannya mengacu kepada misi ke 2 pembangunan daerah yakni meningkatnya kualitas pembangunan pedesaan. Tujuannya untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat. kemudian sasarannya mengarah kepada sasaran ketiga: meningkatnya kapasitas sdm dan fasilitas perkomian perdesaan. Adapun kinerja pelayanan Organisasi Perangkat Daerah disajikan ke dalam tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Tahun Berjalan sampai triwulan II

No	Indikator Kinerja Utama OPD	SPM	IKK	Target Kinerja Capaian Renstra	Realisasi/ Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun Berjalan	Catatan Analisis
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nilai Sakip			74,06	61,06	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah			85	70	
3.	Laporan Keuangan OPD sesuai standar akuntansi pemerintah			Sesuai	Sesuai	
4.	Rasio daya serap tenaga kerja			8,00%	3,75%	
5.	Tingkat produktivitas tenaga kerja			65%	56%	
6.	Persentase penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial			100%	100%	
7.	Pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah			1500	1350	
8.			Persentase IKM yang berkembang modal usaha dan tenaga kerja	15 %	0%	Tidak dilakukakan pendataan
9.			Persentase Izin pelaku IKM yang telah memiliki PIRT (pangan industry rumah tangga)	25 %	2,7%	
10.			Persentase IKM yang terdaftar pada system informasi nasional	40 %	2,3%	
11.			Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	73%	0%	Kegiatan tidak dilaksanakan
12.			Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1,17%	0,35%	
13.			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	45,66%	30,52%	
14.			Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	25,00%	23,02%	
15.			Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	0,90%	0,39%	

Berdasarkan tabel 2.2 diatas seluruh Indikator Kinerja Utama dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran Pembangunan pada tahun 2023 dalam bentuk program dan kegiatan. Namun tidak seluruh program dan kegiatan yang ditetapkan di rencana strategis dilaksanakan. Hal ini karena menyesuaikan dengan pagu anggaran yang telah diberikan. Beberapa Upaya yang telah dilaksanakan untuk mencapai target IKU antara lain :

- 1) Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
- 2) Terjaganya Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Terselenggaranya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 4) Meningkatnya keberdayaan masyarakat menjadi pelaku usaha
- 5) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti berbagai pelatihan/bimtek pengelolaan usaha *home industry*.
- 6) Meningkatkan keberdayaan dan daya serap tenaga kerja melalui pelatihan kerja dan bantuan peralatan
- 7) Memfasilitasi percepatan penumbuhan kawasan industri dengan membangun sentra IKM dan mengadakan pameran industri

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah

Isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dapat dimulai dari sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta hal-hal kritis yang menyangkut pelayanan perangkat daerah. Berkaitan dengan permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2. 3 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan

No.	Masalah Pokok	Masalah	tantangan
Urusan Perindustrian			
1.	Program pembangunan PDL, KIPT, KEK dan gerbangsari yang menjadi prioritas utama pencapaian visi dan misi bupati/wakil bupati terpilih	Ketersedian lahan yang dimiliki pemerintah daerah masih terbatas Masih kurangnya investasi industri besar dan menengah	a. Distorsi harga lahan saat dilakukan pembebasan b. Potensi luas lahan yang mendukung 3 pilar dan gerbang sari cukup besar c. belum dilakukan sosialisasi perda RPIK

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2	SDM pelaku IKM untuk melakukan pembinaan kepada kelompok masyarakat masih rendah	Rendahnya tingkat Pendidikan kader IKM yang relatif tua dan menyebabkan kesulitan mengadopsi IPTEK	a. Umur dan tingkat Pendidikan pelaku usaha
		Keterbatasan petugas yang ada menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan pemberdayaan IKM	b. Formasi petugas jauh dari kebutuhan
3.	Peningkatan nilai tambah pengembangan IKM belum optimal	Masih rendahnya pertumbuhan IKM yang aktif berproduksi	a. Masih rendahnya pertumbuhan industri rumah tangga
		Belum efektifnya penggunaan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Kab. Kep. Selayar	b. Masih rendahnya kapasitas SDM pelaku IKM dalam memanfaatkan IPTEK untuk meningkatkan kualitas produk dan nilai jualnya
			c. Masih kurangnya peningkatan sentra IKM
4.	Akses pelaku usaha IKM terhadap layanan perbankan relatif rendah	Masih banyak IKM yang memerlukan bantuan fasilitas dalam mengembangkan usahanya	a. Masih banyak yang tidak memiliki identitas (ktp) dan legalitas usaha
			b. Belum semua IKM Kabupaten Kepulauan Selayar menghasilkan produk sesuai selera pasar
Urusan Ketenagakerjaan			
5	Masih rendahnya penyerapan tenaga kerja	Rendahnya kesempatan kerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Kompetensi tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan; b. Masih kurangnya aparatur berkompotensi K3; c. Pemanfaatan dan pengelolaan Balai Latihan Kerja (BLK) belum optimal; d. Kondisi Pencari Kerja mengalami kesulitan mengakses informasi mengenai kesesuaian keahlian pekerja dengan kebutuhan perusahaan.

Permasalahan pelayanan Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan dapat ditinjau dari 5 aspek, yaitu pelaksanaan pembangunan PDL, KIPT, KEK dan Gerbangsari, masih rendah SDM pelaku IKM, belum optimalnya peningkatan nilai tambah pengembangan IKM, akses layanan perbankan pelaku IKM belum optimal dan rendahnya penyerapan tenaga kerja. Kelima aspek ini berperan penting dalam peningkatan kinerja mewujudkan visi dan misi Bupati Kepulauan Selayar. Selain tantangan yang dihadapi terdapat juga peluang yang dapat membantu Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan dalam menjalankan mandatnya terhadap melaksanakan program kerja dan kegiatan

yang telah direncanakan. Berikut peluang yang mendorong pelaksanaan kegiatan:

- a) Tersedianya sarana dan prasarana pada Balai Latihan Kerja
- b) Adanya pendampingan pada sektor usaha tenaga kerja mandiri.
- c) Perindustrian dapat didorong menjadi penggerak perekonomian.
- d) Tingginya komitmen pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pembangunan ekonomi
- e) Rakyat sebagai pelaku utama dalam perekonomian daerah.
- f) Adanya dukungan kemajuan teknologi, ekonomi ,dan informasi yang semakin mempermudah pelaksanaan tugas dan kewajiban.

2.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Isu strategis Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaa Kabupaten Kepulauan Selayar dirumuskan dengan memetakan faktor-faktor internal maupun eksternal sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pemetaan faktor internal dilihat berdasarkan kekuatan dan kelemahan dinas, sedangkan pemetaan faktor eksternal dilihat berdasarkan peluang dan ancaman yang dihadapi dinas.

Berdasarkan pemetaan tersebut, dirumuskan strategis yang diberi skor/bobot berdasarkan skor kriteria penentuan isu-isu strategis yang telah ditetapkan. Kemudian dilakukan penilaian isu strategis. Skor kriteria penentuan isu-isu strategis dan Nilai skala kriteria dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 1 Skor kriteria penentuan isu-isu strategis Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Kriteria	Bobot
1	2	3
1.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	10
3.	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan Masyarakat	20
4.	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6.	Prioritas janji politik yang perlu Diwujudkan	25
Total		100

Tabel 3. 2 Nilai Skala Kriteria Permasalahan yang Dihadapi Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pembebasan lahan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas yakni pembangunan PDL, KIPT, dan KEK serta program pendukung Gerakan membangun desa mandiri yang mempunyai potensi yang cukup besar dalam mendukung visi bupati sebagai bandar maritim	20	10	20	10	15	25	100

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Peningkatan potensi, peningkatan nilai tambah, penguasaan teknologi yang berwawasan lingkungan dan berbasis potensi lokal bagi industri kecil dan menengah dengan memberdayakan pelaku IKM yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mengelola produk yang berkualitas yang mampu bersaing dalam pasar global	20	10	20	10	15	25	100
3	Pelaksanaan Undang-Undang No.3 Tahun 2014 pasal 10 dan 11 tentang Rencana Pembangunan Industri kabupaten (RPIK)	20	10	20				50
4	Peningkatan perlindungan dan bantuan bagi pelaku usaha IKM yang terarah dan terintegrasi di Kabupaten Kepulauan Selayar	20		20	10	15		65
5	Peningkatan Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	20	10	20	10	15		75
6	Perluasan jaringan investasi industri besar dan menengah	20	10	20	10	15		75
7	Belum adanya tim teknis ditempatkan secara permanen di Dinas Perindustrian Dan Ketenagakerjaan	20	20	20	15			75
8	Kompetensi tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan	20	20	20	15	10	15	100
9	Masih kurangnya aparatur berkompentensi K3	20	20	20	15			75
10	Pemanfaatan dan pengelolaan BalaiLatihan Kerja (BLK) belum optimal	20	20	20	15	10	15	100
11	Kondisi Pencari Kerja mengalami kesulitan mengakses informasi mengenai kesesuaian keahlian pekerja dengan kebutuhan Perusahaan	20	20	20	15		15	60

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) perubahan dimaksudkan menjadi pedoman dalam merencanakan perubahan anggaran, dan merupakan suatu alat untuk mengukur kinerja instansi yang efektif, berkelanjutan, pedoman arah dalam mencapai sasaran, keluaran dan dampak terhadap kinerja yang akan dilaksanakan serta gambaran terhadap kinerja OPD sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki. Adapun dasar penyusunan rencana kerja perubahan adalah

Oleh karena itu berikut program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan :

3.1.1 Bidang Perindustrian :

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Kegiatan :

a. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri

Kabupaten/Kota

- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

2. Program Pengelolaan Sistem Informasi Nasional

Kegiatan :

- a. Penyediaan informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan kabupaten/ Kota
 - Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data Kawasan industry serta data lain lingkup kabupaten/ kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional

3.1.2 Bidang ketenagakerjaan :

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - Kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 - b. Konsultasi Produktivitas pada perusahaan kecil
 - c. Pengukuran produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Penempatan Tenaga kerja
 - Kegiatan :
 - a. Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota
 - b. Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - d. Perlindungan PMI (Pra dan purna Penempatan) di Daerah Kabupaten / Kota
 - e. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam Satu Kabupaten/Kota
3. Program Hubungan Industrial
 - Kegiatan :

- a. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1(satu) Daerah kabupaten / Kota
 - b. Pencegahan perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah kabupaten / Kota
4. Program Perencanaan Tenaga Kerja
- Kegiatan :
- a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

3.1.3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3.2. Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif

Untuk lebih Jelasnya, Rekapitulasi Perubahan Renja dan Pendanaan OPD berupa tabel 3.1

Tabel 3.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
				Target 2023		Pagu Indikatif				Target	Pagu Indikatif			
				Semula	Menjadi	Renja 2023	Renja 2023 Perubahan							
2														
2														
2	07	01												
2	07	01	2.01							48.000.000				
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000	3.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	6.000.000
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000	4.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	7.000.000
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0		1 Dokumen	5.000.000
				03	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000	4.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	8.000.000
				04	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000	4.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	7.000.000
				05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	2.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	8.000.000
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	4 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	3.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1Dokumen	7.000.000
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					22.235.000	22.235.000			35.000.000
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	1 Laporan	1 Laporan	7.000.000	7.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1 Laporan	15.000.000
					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	5.000.000
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	18 laporan	18 laporan	8.235.000	15.235.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	18 laporan	15.000.000
					Administrasi Umum Perangkat					308.018.400	308.018.400			255.125.288

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Target 2023		Pagu Indikatif				Target	Pagu Indikatif
				Semula	Menjadi	Renja 2023	Renja 2023 Perubahan				
	Daerah										
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	21 unit	21 unit	98.852.000	98.852.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4 paket	50.000.000
	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	12 paket	12 paket	9.666.400	9.666.400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 paket	8.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	1 laporan	12 laporan	199.500.000	199.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 laporan	197.125.288
						164.526.600	164.526.600				204.114.080
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	12 laporan	12 laporan	51.980.000	51.980.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12 laporan	52.906.034
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	8 laporan	8 laporan	112.546.600	112.546.600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		8 laporan	151.208.046
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			88.767.000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	0 unit	0 unit	0	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Unit	28.767.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	0 unit	0 unit			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5 Unit	60.000.000
						22.220.000	22.220.000				68.653.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	5 unit	5 unit	18.200.000	18.200.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5 unit	14.653.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	6 unit	6 unit	4.020.000	4.020.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		6 unit	4.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng			0	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 unit	50.000.000
						133.400.000	133.400.000				701.000.000
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA										
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi					83.400.000	73.400.000				571.000.000
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	30 orang	32. orang	83.400.000	73.400.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		48 orang (15 pelatihan)	371.000.000
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan Sektor Swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana Lembaga pelatihan kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	Kab. Kepulauan Selayar, Kecamatan Benteng, Kelurahan Benteng	0	0	0	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12	200.000.000
	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan kecil					50.000.000	60.000.000				130.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Target 2023		Pagu Indikatif				Target	Pagu Indikatif
				Semula	Menjadi	Renja 2023	Renja 2023 Perubahan				
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang MendapatKonsultansi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)		10 perusahaan	10 perusahaan	50.000.000	60.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		16 perusahaan	50.000.000
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	0	0	0				40.000.000
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja diTingkat Daerah (Dokumen)	Kab. Kepulauan Selayar, Kecamatan Benteng, Kelurahan Benteng	0	0	0	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 dokumen	40.000.000
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					50.000.000	50.000.000				200.000.000
	Pelayanan Antar Kerja di daerah Kabupaten/Kota					14.475.000	14.475.000				135.000.000
	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek danlain-lain untuk Peningkatan Kompetensi (Orang)	Kab. Kepulauan Selayar, Kecamatan Benteng, Kelurahan Benteng	0	0	0	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2 orang	30.000.000
	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Kab. Kepulauan Selayar, Kecamatan Benteng, Kelurahan Benteng	185 orang	185 orang	14.475.000	14.475.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2 layanan	25.000.000
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi pencari kerja	Jumlah Pencari Kerja yang MendapatkanPenyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)kerja	Kab. Kepulauan Selayar, Kecamatan Benteng, Kelurahan Benteng	0	0	0	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		50 orang	30.000.000
	Penyelenggaraan unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yangMendapatkan Fasilitas Layanan ULD (Orang)	Kab. Kepulauan Selayar, Kecamatan Benteng, Kelurahan Benteng	0	0	0	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 layanan	25.000.000
	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah BU/Perusahaan/Instansi yang menciptakan kesempatan kerja baru	Kab. Kepulauan Selayar, Kecamatan Benteng, Kelurahan Benteng	0	0	0	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5 perusahaan	25.000.000
	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah kabupaten.kota					35.525.000	35.525.000				65.000.000
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi danDitingkatkan Kompetensinya Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitas kepulangan	Kab.Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 orang	100 orang	35.525.000	35.525.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		25 orang	20.000.000
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indoensia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)		0	0	0	0			2 orang	45.000.000
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					1.088.400.000	1.088.400.000				343.204.600
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					1.058.000.000	1.058.000.000				63.000.000
	Pengesahan Peraturan Bagi Perusahaan Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar diWLKP Online (Perusahaan)				0	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5 perusahaan	30.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Target 2023		Pagu Indikatif				Target	Pagu Indikatif
				Semula	Menjadi	Renja 2023	Renja 2023 Perubahan				
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan Jumlah tenaga kerja yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Kab. Kepulauan Selayar, Kecamatan Benteng, Kelurahan Benteng	1 laporan	1 laporan	1.058.000.000	1.058.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		33.000.000	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota					30.400.000	30.400.000			280.204.600	
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bimbingan teknis/sosialisasi/FGD tatacara pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang terlaksana Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Kab. Kepulauan Selayar, Kecamatan Benteng, Kelurahan Benteng	0 Perkara	0 Perkara	30.400.000	30.400.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		30.000.000	
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)				0	0		6000 orang	250.204.600	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					2.963.136.400	2.963.136.400			4.721.243.797	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					2.362.936.400	2.362.936.400			2.326.243.797	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.362.936.400	2.362.936.400			2.326.243.797	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kepulauan Selayar, Kecamatan Benteng, Kelurahan Benteng	30 orang/bulan	30 orang/bulan	2.362.936.400	2.362.936.400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	35 orang/bulan	2.326.243.797	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					600.200.000	600.200.000			2.395.000.000	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota					600.200.000	600.200.000			2.395.000.000	
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	Kab. Kepulauan Selayar, Kecamatan Benteng, Kelurahan Benteng			0	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	700.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kab. Kepulauan Selayar, Kecamatan Benteng, Kelurahan Benteng	2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000	100.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	280.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Kepulauan Selayar, Kecamatan Benteng, Kelurahan Benteng	2 Dokumen	2 Dokumen	500.200.000	500.200.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	100.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	Kab. Kepulauan Selayar, Kecamatan Benteng, Kelurahan Benteng			0	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	990.000.000	
	Evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	Kab. Kepulauan Selayar, Kecamatan Benteng, Kelurahan Benteng			0	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	325.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Target 2023		Pagu Indikatif				Target	Pagu Indikatif
				Semula	Menjadi	Renja 2023	Renja 2023 Perubahan				
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					0	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		80.000.000	
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota					0	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		80.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Kab. Kepulauan Selayar, Kecamatan Benteng, Kelurahan Benteng			0	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	30.000.000	
	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Kab. Kepulauan Selayar, Kecamatan Benteng, Kelurahan Benteng			0	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	50.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					0	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		80.000.000	
	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota					0	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		80.000.000	
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	Kab. Kepulauan Selayar, Kecamatan Benteng, Kelurahan Benteng			0	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	25.000.000	
	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen)	Kab. Kepulauan Selayar, Kecamatan Benteng, Kelurahan Benteng			0	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	25.000.000	
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	Kab. Kepulauan Selayar, Kecamatan Benteng, Kelurahan Benteng			0	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	30.000.000	
	TOTAL					4.771.936.400	4.771.936.400			7.230.107.765	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja berpedoman pada Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan (sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 346 dan pasal 360).

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan pada Tahun Anggaran 2023 menjadi sebesar Rp. 4.771.936.400 (Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribuan Empat Ratus Rupiah). Anggaran Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan dipergunakan untuk menunjang pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana yang tertuang Renstra Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Tahun 2021-2026 serta menunjang visi misi kepala daerah Tahun 2021-2026 yaitu Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Meningkatkan kualitas Pembangunan perdesaan dan mengembangkan pengelolaan potensi kemaritiman. Sebagai tindaklanjut atas ditetapkannya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2023 ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2023;

2. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Aksi Kinerja pada Tahun Anggaran 2023;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2023.

Demikian Rancangan Perubahan Rencana Kerja ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Benteng, 2023
KEPALA DINAS

Hj. ANDI ROS IRMA, S. Sos
Pangkat : Pembina Tingkat I
NIP.19701001 199203 2 013